

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Rhesa Wibowo Putra¹

Abstrak

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Dr. Rita Kalalinggi, M.Si dan Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai pengelolaan dan penanggulangan terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan dalam menanggulangi banjir yang dilakukan oleh BPBD Kutai Barat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana, Sekertaris, Kasubag Perencanaan Program, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kabid Kedaruratan dan Logistic.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam bidangnya, koordinasi yang dibangun oleh BPBD baru terbangung ketika bencana terjadi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Saran peneliti diharapkan agar dapat merekrut relawan yang berkompeten dibidangnya dan juga pelatihan-pelatihan guna membentuk koordinasi yang baik dalam menanggulangi bencana banjir serta peran pemerintah dalam membantu sarana dan prasarana agar penyelenggaraan bencana banjir dapat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir. Kabupaten Kutai Barat*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan di Daerah, karena yang namanya pembangunan nasional itu adalah seluruh daerah-daerah yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena pembangunan nasional adalah wujud nyata daripada pembangunan daerah dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rhesa07w@gmail.com

pembangunan diberbagai sektor, maka pemerintah daerah dilengkapi dengan unsur pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintah

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi sekarang ini. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai serta sistem saluran drainase tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu bentuk penanggulangan bencana, yang mempunyai kontribusi dalam terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat dipercaya bisa melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Akan tetapi mencegah dan menanggulangi bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau orang perorang. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindari dari banjir, salah satunya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak menjadikan aliran sungai atau aliran drainase menjadi tempat sampah.

Kabupaten Kutai Barat dilihat dari kondisi geografis terletak di wilayah lintasan khatulistiwa menjadikan wilayah ini beriklim tropika basah dengan curah hujan dan suhu yang tinggi. Akibatnya, wilayah ini rawan terhadap bencana banjir. Karakter yang demikian menyimpan potensi bencana yang dapat menurunkan produktivitas lahan, kerusakan lingkungan, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Pengenalan terhadap potensi bencana banjir di suatu wilayah menjadi sangat penting, agar sejak dini dapat dilakukan upaya terhadap penanggulangan bencana.

Didirikanya BPBD setidaknya menjadi bukti bahwa Kabupaten Kutai Barat serius dalam penanganan bencana khususnya banjir dimana banjir merupakan bencana tahunan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Barat menjadi daerah yang sadar akan bencana.

Dalam hal ini yang perlu disadari oleh kita bahwa bencana banjir dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan banjir dapat dilihat dari cara hidup masyarakat yang sebagian besar belum mencerminkan budaya hidup bersih dan sehat. Masyarakat terbiasa untuk membuang sampah di sepanjang aliran sungai dan drainase tanpa peduli terhadap dampaknya, dan kebiasaan masyarakat yang tidak ramah pada lingkungan. Kegiatan gotong royong yang diadakan oleh pemerintah setempat juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu sosialisasi penanggulangan bencana banjir harus di upayakan secara integral kepada seluruh elemen pemerintah daerah, non pemerintah dan masyarakat karena sangat dibutuhkan dalam mereduksi manajemen penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat”

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Atau kebijakan publik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kebijakan publik atau umum.

Menurut Anderson (Winarno, 2007:18) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan Sedangkan Dunn (Solthan, 2009:34) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta yaitu Polis (negara kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan umumnya terkait dengan kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan-perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang di amanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Sepeti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1984:4) menjelaskan lebih rinci proses implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.

Karakteristik Kebijakan Publik

James Anderson dan kawan-kawannya dalam S. Abdul Wahab (2002: 41) mengemukakan beberapa karakteristik dari kebijakan yaitu :

1. Public policy is purposive, goal oriented behavior, rather random of chance

behavior. Artinya setiap kebijakan mutlak memiliki tujuan tidak hanya sekedar asal buat atau kebetulan karena kesempatan membuatnya.

2. Public policy consist of course of action rather than sparate discreate decision of actions performed by government officials. Maksudnya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4. Public policy my be either negative or positive. Kebijakan dapat berbentuk negatif (melarang) dan dapat juga berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Public policy is based on law and authoritative. Kebijakan didasarkan pada hukum karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

Unsur- Unsur Kebijakan Publik

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub sistem atau elemen komposisi dari proses kebijakan. Said Zainal Abidin (2004: 45) menyatakan bahwa terdapat lima unsur dari suatu kebijakan bila dilihat dari perspektif strukturnya yaitu:

1. Tujuan kebijakan telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan, tidak perlu adanya kebijakan, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasioanal atau realistiknya (*national of realistic*) jelas dan berorientasi kedepan (*future oriented*)
2. Masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menemukan proses kebijakan tidak ada artinya suatu metode pemecahan suatau masalah kebijakan bilamana pemecahannya dilakukan pada masalah yang tak benar. Dengan kata lain, bila suatu masalah telah dapat didefinisikan secara tepat maka maka peluang penyelesaian masalah kebijakan akan potensial.
3. Tuntutan (*Demand*). Telah diketahai partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju (*Huntington*). Partisipasi tersebut dapat berbentuk dukungan. Tuntutan, dan tantangan, atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat berifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dan tuntutan, gerahnya masyarakat dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut.
4. Dampak (*Out Comes*). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Pada perkembangannya, dampak yang terjadi publik akan dijadikan sebagai rujukan evaluasi bagi formulasi pengembangan kebijakan publik berikutnya.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat

dampak buruk bencana. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Definisi Konsepsional

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting karena konsep dapat memberikan gambaran penelitian yang diteliti. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang ada hubungannya dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini ialah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di

Kabupaten Kutai Barat adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan prabencana, kegiatan saat tanggap darurat, kegiatan pasca bencana. Dimana kegiatan prabencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Sedangkan kegiatan saat terjadi bencana adalah kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta prasarana dan sarana.

Fokus Penelitian

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat :
 - a. Prabencana
 - b. Saat tanggap darurat
 - c. Pascabencana
2. Faktor penghambat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Barat.

Jenis dan sumber data

Menurut Loftland Moleong (2008:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer
Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.
2. Data sekunder :
Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a. Dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar memahami tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung sehingga mampu memberikan data secara maksimal dan *Snawball Sampling* yaitu masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi mengenai pemberdayaan masyarakat kampung.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini penulis akan menyajikan data-data mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat yang menulis peroleh di lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikator-indikator yang penulis tentukan pada fokus penelitian.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap informan yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag perencanaan program, Kabid Rehabilitasi dan rekonstruksi, Kabid Kedaruratan dan logistic, serta 5 orang Masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Kutai Barat.

Prabencana

BPBD Kutai Barat lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan pengurangan resiko bencana tertentu akan memerlukan kerjasama antara berbagai instansi, seperti penyiapan sistem peringatan dini banjir, sosialisasi sistem peringatan dini dan pelatihan penggunaanya akan melibatkan sektor-sektor, perguruan tinggi dan LSM, sedangkan peran BPBD adalah sebagai koordinator pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi dan penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat mengantisipasi sebelum terjadinya bencana badan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Barat juga melakukan sosialisasi dan mengkoordinir dinas-dinas yang terkait dalam SKPD pemerintah daerah kabupaten kutai barat seperti dinas perhubungan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan, kepolisian, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja untuk dapat berkoordinasi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk dapat membantu dan melakukan tupoksi SKPD nya masing-masing dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana di daerah Kabupaten Kutai Barat jadi dalam hal ini Badan penanggulangan Bencana Daerah bertindak sebagai kordinator jika terjadi suatu bencana di daerah Kabupaten Kutai Barat dan merangkul SKPD yang bersangkutan dengan tupoksinya dalam membantu masyarakat daerah Kabupaten Kutai Barat yang tetimpa musibah bencana

Saat Tanggap Darurat

Mekanisme tanggap darurat dalam penanggulangan bencana banjir perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana banjir harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana maka pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala BPBD Kutai Barat sesuai dengan

kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Jadi untuk keadaan darurat kita menempatkan kepala komando disetiap tim pada titik-titik bencana banjir, tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi dan kontrol penanggulangan bencan secara langsung dan cepat tanggap pada masyarakat.

Hal ini dimaksud agar mempermudah akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan barang serta penyelamatan.

Penyelamatan dan Evakuasi

Penyelamatan dan evakuasi darurat adalah perpindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sebenarnya dari bahaya. Rencana penyelamatan dan evakuasi darurat dikembangkan untuk memastikan waktu evakuasi teraman dan paling efisien bagi semua penduduk yang diharapkan dari suatu bangunan, kota, atau wilayah. Dalam hal penyelamatan dan evakuasi BPBD Kutai Barat menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) guna turun kelapangan, tim tersebut biasanya dikomando oleh komando yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh Kepala BPBD guna mengkoordinir jalanya penyelamatan dan evakuasi di lapangan.

Penugasan Tim Reaksi Cepat ini guna melakukan pengkajian ke lokasi bencana secara cepat dan tepat serta memberikan dukungan dalam kegiatan tanggap darurat. Hasil Kajian TRC akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah atau instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya atau untuk menetapkan status atau tingkat bencana.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam kondisi bencana banjir salah satu hal yang harus dan perlu diperhatikan pemerintah selaku pelayan masyarakat khususnya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana, dan hal-hal yang dilakukan oleh BPBD Kutai Barat antara lain penyediaan posko bantuan. Pembuatan posko dalam situasi bencana banjir sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam memulai beragam aktivitas dan proses penanggulangan bencana. Posko bantuan merupakan suatu upaya yang menitikberatkan pada kesiapsiagaan, mengingat begitu banyak hal dan kemungkinan yang dapat terjadi ketika bencana datang. selain posko Pemerintah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai barat juga harus menyediakan setidaknya perlengkapan untuk para korban Banjir seperti selimut, pakaian layak pakai, air bersih, dapur umum maupun WC umum untuk keperluan kehidupan para korban banjir dalam masa bencana

Pasca Bencana Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi

Dalam hal ini penanggulangan pasca bencana, terutama penanganan rekonstruksi, maka diperlukan suatu proses rekonstruksi yang tepat berdasarkan perencanaan yang baik, sehingga tepat sasaran dan juga tertib dalam penggunaan dana, serta mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa datang melalui usaha-usaha pengurangan resiko bencana. Proses rekonstruksi pasca bencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, dan mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana bukan memperparah kondisi kerentanan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD di Kabupaten Kutai Barat

Faktor Pendukung

Dengan banyaknya instansi/organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendukung implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat. Instansi/organisasi inilah yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkompeten dibidang penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari berdirinya badan ini.

Faktor Penghambat

Pemilihan SDM yang kurang tepat merupakan salah satu faktor penghambat bagi perkembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat. Sebagai lembaga baru tentunya BPBD memilih sumber daya manusia yang mempunyai basic penanggulangan bencana agar dapat menunjang perkembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Bapak Yulianus mengatakan bahwa:

BPBD harusnya memilih relawan yang mempunyai basic penanggulangan bencana karena sebelumnya sudah ada beberapa organisasi yang mempunyai basic penanggulangan bencana seperti SAR, PMI, dan PRAMUKA misalnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan. Daripada memilih sumber daya manusia yang mesti diberikan pelatihan ini dan itu sehingga kurang pelatihan maka yang nampak dilapangan adalah kekacauan.

Dari pernyataan informan diatas bahwa sumber daya yang tidak berkompeten dibidang penanggulangan bencana akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi perkembangan Badan Penanggulangan Benacan Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dokumen dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa temuan-temuan yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Dan dalam penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam bidangnya (basic penanggulangan bencana) padahal Kabupaten Kutai Barat mempunyai organisasi yang berkompeten di bidangnya.
2. Koordinasi yang dibangun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku badan yang mengkomandoi organisasi lain namun koordinasi baru terbangun ketika bencana terjadi.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dikarenakan masih kurangnya bantuan dari pemerintah setempat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk perekrutan relawan selanjutnya sebaiknya diambil dari beberapa organisasi yang dianggap telah berkompeten dibidang penanggulangan bencana atau paling tidak memilih sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal ini.
2. Dalam hal koordinasi sebaiknya lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan bersama yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan organisasi-organisasi yang berkaitan dalam hal penanggulangan bencana, gunanya adalah untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan terkoodinir dalam menanggulangi bencana.

3. Dalam hal ini sebaiknya peran pemerintah lebih dapat melihat lagi apa yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga sarana dan prasarana dari BPBD dapat terpenuhi sehingga dalam penyelenggaraanya pun dapat lancar.

Daftar Pustaka

- Edward III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- J. Lexy Moleong. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*. London: Sage.
- Solthan, Azikin. 2009. *Dinamika Politik Daerah dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Konsep*. Yogyakarta: MedPress.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Government*. Bandung: InsanCendikia